

**PERUBAHAN RENCANA
AKSI KINERJA TAHUN**

2023

DKUPP
KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yg telah melimpahkan, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat menyusun Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018-2023 .

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2023

Purwakarta, Oktober 2023

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

EKA SUGRIYANA, S.P, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19700407 199803 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia.....	5
1.5. Dasar Hukum	7
1.6. Maksud dan Tujuan.....	8
1.7. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	11
2.3. Perjanjian Kinerja.....	14
2.4. Rencana Aksi Kinerja.....	17

BAB III PENUTUP.....

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana tersebut di atas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan

Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Susunan organisasi Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Sub bagian keuangan
 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Perencana Ahli Muda
- c. Kepala Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Pengawas Koperasi Ahli Muda
 2. Pengawas Koperasi Ahli Muda
 3. Pengawas Koperasi Ahli Muda
- d. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda
- e. Kepala Bidang Perdagangan, terdiri atas ;
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan
 3. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.
- f. Kepala Bidang Perindustrian, terdiri atas ;
 1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda;
 2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda; dan

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi ,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 127 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	17
2	Jabatan Fungsional	17
3	Pelaksana	41
4	Non PNS	52

b. Susunan Pegawai Berdasarkan Bagian, Bidang dan UPTD

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	28
2	Bidang Koperasi	4
3	Bidang UKM	8
4	Bidang Perdagangan	14
5	Bidang Perindustrian	11
6	UPTD Pasar Leuwipanjang	19
7	UPTD Pasar Wanayasa	10
8	UPTD Pasar Citeko	15
9	UPTD Metrologi Legal	11
10	UPTD Pengembangan Sentra Keramik	7

c. Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	10
2	Sarjana Strata 1	28
3	Diploma 3	5
4	SMA/SMK	28
5	SMP	1
6	SD	4

d. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	34
3	Golongan II	31
4	Golongan I	4

e. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1	Perempuan	41
2	Laki-Laki	86

1.5. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana aksi kinerja, sebagai berikut

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja ;

1.6. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023, dan tujuan disusunnya rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2023 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Aksi Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Maksud dan Tujuan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II Perencanaan

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi

BAB III Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023 memuat Visi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, yaitu: Mewujudkan Purwakarta Istimewa. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengemban Misi ke 4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Untuk menyelenggarakan misi tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan untuk misi tersebut, yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan
2. Peningkatan perlindungan terhadap konsumen
3. Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar
5. Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam

meningkatkan produktifitas.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif
2. Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh
3. Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
4. Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang
5. Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar
6. Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta seperti berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Laju Koperasi Aktif	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4.69 %	4.74 %	4.83 %	4.92 %	5.00 %
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	80 %	80 %	80 %
Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	-	-	150 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi
	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	-	-	150 UKM	150 UKM	150 UKM
Peningkatan perlindungan terhadap konsumen	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	-	-	1500 UTPP	1700 UTPP	2000 UTPP
Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	-	-	9 Komoditi	9 Komoditi	9 Komoditi
Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	-	-	-	100 %	100 %
Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif	-	-	30 IKM	30 IKM	30 IKM

2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indikator Kinerja Utama Pemda				
1	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100	
		Laju Koperasi Aktif	100	

2	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	75	
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	5	
Indikator Kinerja Utama OPD				
3	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	80	
4	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	150	
5	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	150	
6	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	3000	
7	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	9	
8	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	100	
9	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif	30	

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,597,534,140
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	150.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	471,370,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	134,588,000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2,716,795,200
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	99,924,100

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	279,999,900
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	170,000,000
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	217,953,800
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100,000,000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	300,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	50,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50,000,000

2.4. Rencana Aksi

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (triwulan). Adapun Perubahan Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.558.000					
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.467.200			√		
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.090.800			√		
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	94.790.800					
							Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah	94.790.800	√				
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	242.990.000					
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	78.000.000	√				
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	164.990.000	√	√			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.675.645.700					
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33.175.700	√	√	√	√	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-					
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35.034.000	√	√	√	√	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.163.887.500	√	√	√	√	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	255.119.700	√	√	√	√	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	√	√	√	√	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.448.800	√	√	√	√	
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.980.000	√				
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	180.000.000					
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	180.000.000	√				

								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.649.874.564				
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	√	√	√	√
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	286.600.116	√	√	√	√
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.361.274.448	√	√	√	√
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.060.000					
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	85.000.000	√	√		
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	34.000.000	√	√		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18.250.000	√	√	√	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	796.810.000	√		√	
2	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	√	√	√	√	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	100.000.000					
							Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000					
							Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	√	√	√	√	
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Sehatnya	150.000.000					
							Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000					
							Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50.000.000	√	√	√		
							Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	100.000.000		√			

							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	471.370.000				
							Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.370.000				
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan UKM	471.370.000	√	√	√	√
3	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	√	√	√	√	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		134.588.000				
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	134.588.000				
							Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	110.000.000		√		√
							Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	24.588.000				√
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		2.716.795.200				
							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.716.795.200				
							Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.716.795.200	√	√	√	√
4	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	√	√	√	√	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Terfasilitasinya Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	99.924.100				
							Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	74.924.100				
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	74.924.100	√	√	√	
							Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25.000.000				
							Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	25.000.000		√	√	√

						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	-					
						Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		-					
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-					
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Distributor	279.999.900					
						Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000					
						Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000				√	
						Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	25.000.000	√				
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	195.000.000					
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	√	√	√		
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	175.000.000	√				
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	34.999.900					
						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	34.999.900	√	√	√		
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor di Kabupaten Purwakarta	170.000.000					
						Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000					
						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	50.000.000			√		
						Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	120.000.000			√		

							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Terciptanya Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	100.000.000				
							Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100.000.000				
							Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000		√	√	
5	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTPP bertanda tera sah yang berlaku	√	√	√	√	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	217.953.800				
							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	217.953.800				
							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	167.967.500	√	√	√	
							Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	49.986.300	√	√	√	√
6	Meningkatnya kualitas dan produktifitas produk IKM	Jumlah IKM produktif	√	√	√	√	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	300.000.000				
							Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	300.000.000				
							Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	50.000.000			√	
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000				√
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50.000.000		√		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.000.000	√		√	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		50.000.000				
							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten	50.000.000				
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	√			

							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengembangan Diverifikasi Produk IKM	50.000.000				
							Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000				
							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000			√	
							Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten melalui SIINas	-				
Jumlah									20.438.165.140				

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Perubahan Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya perubahan rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.